LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolegial, dimana kami telah menunjuk satu orang pejabat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (PD) untuk duduk sebagai PPID (Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi) Pembantu yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi OPD tersebut.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar senantiasa kami unggah di situs resmi www.karanganyarkab.go.id, selain website tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga telah memiliki website PPID dengan alamat ppid.karanganyarkab.go.id, dan sistem aduan online di sapamas.karanganyarkab.go.id. selain itu juga telah dilaunching beberapa layanan yang dapat diakses masyarakat umum seperti : Si Cerdik (Sistem Informasi Cerdas Mendidik) http://sicerdik.karanganyarkab.go.id, GRMS Kabupaten Karanganyar yang meliputi e-planning, e-budgeting, dan Siharga http://grms.karanganyarkab.go.id, Produk hukum yang ada di Kabupaten Karanganyar http://jdih.karanganyarkab.go.id, Sistem Informasi Layanan berbasis GeoSpasial http://layangmas.karanganyarkab.go.id serta aplikasi APBD Kabupaten Karanganyar yang dapat diakses di apbd.karanganyarkab.go.id, Sosialisasi dan diseminasi informasi melalui majalah INTANPARI (Karanganyar Tenteram), melalui media penyiaran LPPL Radio SWIBA (Swara Intanpari Membangun), menerbitkan

dan mendistribusikan buku-buku profil dan potensi daerah, profil anggaran tahunan (RKA/DPA OPD), mempublikasi Laporan Tahunan, serta melalui kerjasama dengan berbagai media televisi dan media cetak komersial.

Dengan berbagai strategi tersebut diatas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan sebelum diminta, sehingga dapat memudahkan kinerja dan lebih fokus pada agenda setting sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

b. Sarana dan Prasarana

I. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Kabupaten Karanganyar masih minim dan belum representatif. Kantor sekretariat PPID Kabupaten Karanganyar sampai saat ini masih menjadi satu dengan Kantor Dinas KOMINFO Kabupaten Karanganyar dengan ruangan berada diruang Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yakni di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Gedung B Jalan Lawu No. 385 B.

II. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui *website* :

1. http://karanganyarkab.go.id
2. http://ppid.karanganyarkab.go.id
3. http://jdih.karanganyarkab.go.id
4. http://sapamas.karanganyarkab.go.id
5. http://layangmas.karanganyarkab.go.id
6. http://profildaerah.karanganyarkab.go.id
7. http://sicerdik.karanganyarkab.go.id
8. http://grms.karanganyarkab.go.id/
9. http://infrastruktur.karanganyarkab.go.id/
10. http://dapodik.karanganyarkab.go.id/new/
11. https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/rekapKldi?idKldi=D125
12. http://lpse.karanganyarkab.go.id/eproc4
13. http://lpsereport.karanganyarkab.go.id/
14. http://apbd.karanganyarkab.go.id

Selain *website* tersebut diatas, informasi publik juga bisa diperoleh dengan mengakses *website* masing-masing OPD.

a. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Kabupaten Karanganyar sebanyak 71 (Tujuh puluh satu orang) diantaranya merupakan PPID Pembantu yang berada di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, BUMD dan Kepengurusan PPID.

b. Anggaran dan Penggunaannya

Pada tahun 2018 pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Karanganyar dianggarkan pada APBD Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-

c. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2018 antara lain :

I. Mengadakan bimbingan teknis PPID bertempat di Hotel Taman Sari Karanganyar dengan peserta 92 orang yang terdiri dari PPID Pembantu dan Admin PDF masing-masing OPD dan 17 kecamatan. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar mewakili Bupati Karanganyar, PPID Utama Kabupaten Karanganyar dan Nara Sumber dari Komisi Informasi Jawa Tengah.

II. Melaksanakan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan PPID bertempat di Ruang Podang 1 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar yang menghadirkan seluruh PPID Pembantu di Kabupaten Karanganyar. Jalannya Rakor dipimpin langsung oleh atasan PPID Utama yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar didampingi oleh PPID Utama dan Sekretariat kelembagaan PPID Kabupaten Karanganyar.

III. Melakukan Monitoring dan Evaluasi bagi PPID pembantu untuk optimalkan peran PPID Pembantu di level Dinas/Badan dan kecamatan yang dilaksanakan pada bulan April dan Mei.

IV. Pembuatan sub domain (website) bagi OPD sekaligus pelatihan bagi admin website dan lomba website OPD, bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Pembikinan website ini diharapkan OPD mampu menyajikan informasi dan dokumentasi yang

dikuasai oleh OPD tersebut sehingga masyarakat mudah dalam mengakses lewat website. Dan bagi admin website dapat meningkatkan kemampuan SDM nya.

Penilaian Pemeringkatan badan publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah lingkup Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada bulan Maret hingga November 2018 yang terdiri dari penilaian situs web, penilaian kuesioner penilaian mandiri, dan visitasi/kunjungan lapangan dan presentasi terbuka, serta presentasi akhir.

Berdasarkan hasil penilaian yang diumumkan pada Malam Penghargaan Pemeringkatan Badan Publik pada Bulan Desember 2018 PPID Kabupaten Karanganyar mendapatkan penghargaan sebagai badan publik menuju informatif (peringkat 7 dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Jawa Tengah) dan RSUD Karanganyar mendapatkan penghargaan sebagai badan publik menuju informatif (peringkat 3 di Propinsi Jawa Tengah).

III. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Kabupaten Karanganyar dihimpun di Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yang dikelola Kepala Bidang Tata Kelola Informatika serta beberapa staf di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan mengadakan rakor PPID, PPID Utama akan mendistribusikan kebutuhan informasi yang diperlukan kepada unit kerja yang menguasai informasi public (PPID Pembantu). Kemudian staf sekretariatan PPID Kabupaten akan meminta informasi tersebut yang berbentuk softcopy maupun hardcopy dengan mendatangi langsung ke OPD.

IV. Rincian Pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan PublikTahun 2018

No	SKPD	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2017
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar	51
2	Sekretariat DPRD	
3	Inspektorat	
4	Badan Keuangan Daerah	
5	Badan Perencaaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	72
6	Satuan Polisi Pamong Praja	20
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
11	Dinas Kesehatan	
12	Dinas Lingkungan Hidup	7
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	23
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
19	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah	-
20	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	
22	Dinas Pertanian dan Pangan	25
23	Dinas Sosial	-
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	3
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5
26	Kecamatan Colomadu	7
27		
28	Kecamatan Gondangrejo	
29	Kecamatan Jaten	-
30	Kecamatan Jatipuro	2
31	Kecamatan Jatiyoso	
32	Kecamatan Jenawi	
33	Kecamatan Jumantono	-
34	Kecamatan Jumapolo	
35	Kecamatan Karanganyar	-
36	Kecamatan Karangpandan	
37	Kecamatan Kebakkramat	
38	Kecamatan Kerjo	
39	Kecamatan Matesih	

40	Kecamatan Mojogedang	
41	Kecamatan Ngargoyoso	
42	Kecamatan Tasikmadu	-
43	Kecamatan Tawangmangu	19
44	RSUD Karanganyar	
45	PDAM Tirta Lawu	
46	SAPAMAS	302
	TOTAL	**475**

V. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

SOP yang tertuang dalam Perbup Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun SOP tersebut antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, dan SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas SDM PPID yang belum semuanya memahami dengan baik UU KIP, dikarenakan kurangnya pemahaman OPD (PPID Pembantu dalam menjalankan tugas pokok fungsinya).
2. Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
3. Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Masing – masing Organisasi Perangkat Daerah supaya menyiapkan daftar informasi dan dokumentasi publik (DIDP tahun 2018).
2. Masing – masing Organisasi Perangkat Daerah supaya menghidupkan kembali *website* bagi yang sudah pernah memiliki, dan bagi yang belum agar supaya membuat *website*. Hal tersebut untuk mempernudah dalam menyajikan informasi publik.
3. Dalam Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi telah ditunjuk PPID Pembantu yang berada di tingkat OPD, untuk membantu sekaligus memperlancar layanan informasi publik di masing-masing OPD, supaya masing-masing OPD (Dinas/Badan/BUMD) tersebut membentuk petugas PPID untuk membantu petugas PPID Pembantu.
4. Dihimbau kepada masing-masing PPID Pembantu mencatat (meregister) semua permohonan informasi dokumentasi yang di minta oleh pemohon informasi.

VII. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Karanganyar, diharapkan masing-masing satuan kerja di lingkup PPID Pembantu dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik,

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Pemerintah Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Karanganyar, 21 Januari 2019

SEKRETARIS DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku
PPID Utama

Drs. AGUNG TJAHJO NUGROHO, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP.19670114 199503 1 003

DOKUMENTASI
KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PPID
TAHUN 2018

Pendampingan Pembuatan Website Bagi PPID Pembantu

Pendampingan ini diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Karanganyar, diharapkan dengan pembuatan website bagi OPD akan berdampak kepada mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi publik yang dikuasai oleh OPD.

KEBUT PEMBUATAN WEBSITE DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

diskominfo | 23 Maret 2018 | No comments

DISKOMINFO

DISKOMINFO

BERANDA PROFIL BERITA INFORMASI PUBLIK STATISTIK PRODUK HUKUM PENGUMUMAN STREAMING LPPL RADIO BWBA FM

Posted in Berita

NAVIGASI POS

©Diskominfo 2018

Monitoring PPID Utama ke PPID Pembantu (Kecamatan)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karanganyar mengadakan Monitoring dan Evaluasi di Ruang Podang I pada hari selasa (17/07)

OPTIMALKAN PERAN PPID DI LEVEL KECAMATAN, PPID UTAMA KABUPATEN KARANGANYAR LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI.

diskominfo 18 Juli 2018 No comments

Suasana monitoring dan Evaluasi

Karanganyar – Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus berusaha memperbaiki layanan permohonan informasi yang telah dijalankan. Hal ini selaras dengan terbitnya UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Permendagri 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi Kemdagri dan Pemerintah Daerah.

Bertempat di Ruang Podang I Kantor Sekretariatan Daerah Kabupaten Karanganyar, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karanganyar mengadakan monitoring dan evaluasi bagi PPID Pembantu kecamatan yang berada di Kabupaten Karanganyar, selasa siang (17/07). Sebelum monitoring dan evaluasi di Kecamatan, tim PPID Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan gal yang sama di level badan dan dinas serta instansi yang berada di Kabupaten Karanganyar.

PPID Utama Kabupaten Karanganyar Agung Tjahjo Nugroho dalam sambutan pembukaannya menekankan akan pentingnya tugas dan peran PPID dalam era keterbukaan informasi publik. Kabupaten Karanganyar di tahun 2018 ini terus mengupayakan memberikan layanan terbaik untuk memenuhi hak pemohon dalam mengakses informasi. Kerja keras ini terbukti dengan website Kabupaten Karanganyar masuk 10 besar dalam tahapan pertama penilaian.

"Target kita (Kabupaten Karanganyar) adalah masuk tiga besar, kerja keras kita semua dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi harus kita tingkatkan", kata Agung Tjahjo.

DISKOMINFO
DISKOMINFO

BERANDA PROFIL BERITA INFORMASI PUBLIK STATISTIK PRODUK HUKUM PENGUMUMAN STREAMING LPPL RADIO SIWIBA FM

masing kecamatan yang ditugasi sebagai admin website.

"Silahkan datang ke Diskominfo bagi bapak/ibu yang ingin belajar mengelola website", tambah Agung Tjahjo.

Demikian Diskominfo (ana/dn/ina)

Posted in Berita

NAVIGASI POS

Streaming LPPL Radio Siwiba FM

Hari Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahap ke Dua

©Diskominfo 2018

Penyelenggaraan Rakor Tim Pengelola Data Fungsional dan Pengelola SAPAMAS supaya masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan mewujudkan tata kelola informasi dan komunikasi dengan baik dilaksanakan di Ruang Podang I Kantor Sekretariat Daerah Kab. Karanganyar (9/10)

WUJUDKAN TATA KELOLA INFORMASI YANG HANDAL

diskominfo 10 Oktober 2018 No comments

KARANGANYAR – 09 oktober 2018

Untuk mewujudkan tata kelola informasi yang handal dan mumpuni, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan rakor Tim Pengelola Data Fungsional dan Pengelola Sapamas. Bertempat di ruang Podang 1 kantor Setda, koordinasi itu menyatukan langkah seiring dengan keterbukaan informasi publik dengan jajaran perangkat daerah.

"Kita menginginkan Karanganyar mempunyai tata kelola informasi yang baik dan padu. Era keterbukaan informasi membuat kita harus berbenah diri agar masyarakat luas dapat mengakses akses informasi seluas-luasnya," papar Plt Kepala Diskominfo Karanganyar, Bachtiar Syarief.

Rakor tersebut dihadiri oleh Pengolah Data Fungsional (PDF) seluruh OPD di Kabupaten Karanganyar. Termasuk PDF di 17 kecamatan di Karanganyar. Rakor tersebut juga mensosialisasikan Peraturan Bupati Karanganyar. No 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Tehnologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Tujuan dari Perbup tersebut adalah mendorong terlaksananya pemanfaatan TIK secara benar, efisien, efektif dan sesuai dengan perkembangan tehnologi. "Misalnya PU mempunyai kegiatan proyek A. Masyarakat perlu tahu kegiatannya, dananya dan yang lain terkait suatu program tersebut. Saya berharap semua perwakilan OPD siap sehingga Karanganyar bisa mewujudkan tata kelola informasi dan komunikasi dengan baik," imbuhnya.

Sementara Kepala Bidang Tata Kelola Informatika, Bambang Sugito mengatakan terkait kanal aduan dari masyarakat melalui IG, WA atau FB sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Hanya saja, aduan yang melalui nomor SMS belum direspon dengan baik. Artinya responnya kurang cepat sebagaimana WA , IG atau WA. "Bahkan ada yang ganti nomor HP –untuk perangkat OPD– tanpa memberi tahu terlebih dahulu sehingga aduan

DISKOMINFO
DISKOMINFO

BERANDA PROFIL BERITA INFORMASI PUBLIK STATISTIK PRODUK HUKUM PENGUMUMAN STREAMING LPPL RADIO SWIBA FM

nomor 3 Tahun 2018. Menurut Eko untuk persiapaan lomba website akan dilangsungkan bulan Nopember. Diharapkan masing-masing OPD untuk mempersiapkan tampilan website. "Penilainya website terbaik adalah desain, konten, operabilitas dan integrasi. Hal ini dalam rangka juga mempersipkan tata kelola informasi yang baik," imbuhnya. (hr)

Posted in Berita
Tagged aduan, data, informasi, SAPAMAS, tata kelola, teknologi, website

NAVIGASI POS

Sambutan Bupati Karanganyar

Perkembangan Indeks Harga Konsumen / Inflasi di Kabupaten Karanganyar Bulan September 2018 deflasi 0,17 persen

©Diskominfo 2018

Visitasi

Penerimaan Tim Visitasi dan Verifikasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Podang II Komplek Kantor Bupati Karanganyar pada Hari Selasa (30/10)

BERANDA PROFIL BERITA INFORMASI PUBLIK STATISTIK PRODUK HUKUM PENGUMUMAN STREAMING LPPL RADIO SWIBA FM

OPTIMIS PPID KABUPATEN KARANGANYAR DI PERINGKAT TERTINGGI

sophi gunawan 31 Oktober 2018 No comments

Penilaian pemeringkatan Badan Publik tahun 2018 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Karanganyar telah memasuki tahap Visitasi dan Verifikasi. Selasa, (30/10) Asisten Pemerintahan Sekda sekaligus Plt.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Drs. Bachtyar Syarif menerima Tim Visitasi dan Verifikasi dari Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah, di Podang 2 Komplek Kantor Bupati Karanganyar.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Karanganyar, Drs. Agung Tjantjo Nugroho, MM pada kesempatan tersebut mempresentasikan mengenai kinerja PPID Utama Kabupaten Karanganyar. Presentasi merupakan salah satu poin penilaian selain Daftar Informasi Publik (DIP), dan verifikasi Self Assesment Questionare (SAQ).

Dalam proses verifikasi Tim Komisi Informasi yang diketuai oleh Drs. Sosiawan, Tim melakukan pengecekan data dan informasi yang tertera di SAQ dengan data dukung fisik yang disediakan. Unggahan data dan informasi di website Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan beberapa Perangkat Daerah serta unggahan di Open Data juga tidak luput diteliti.

Selain PPID Utama, obyek penilaian juga ditujukan kepada PPID Pembantu RSUD Kabupaten Karanganyar serta PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Pemerintah Kabupaten Karanganyar optimis bisa menempati peringkat tertinggi pada Pemeringkatan Badan Publik oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah. Keterbukaan informasi publik dewasa ini telah menjadi prioritas dan concern Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk menjawab hak untuk tahu dan hak mendapatkan informasi masyarakat. (sf).

Posted in Berita

NAVIGASI POS

Syarat-Syarat Izin Pendirian Menara Telekomunikasi

Berita Hoax Bulan September 2018

©Diskominfo 2018

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, SH, MM melakukan uji public keterbukaan informasi berbasis teknologi informasi menuju smart city di Gedung Pasca Sarjana Universitas Semarang pada Hari Selasa (21/11)

MENGUJI KETERBUKAAN LEWAT UJI PUBLIK

sophi gunawan 23 November 2018 No comments

Pemeringkatan badan publik di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 telah memasuki tahap akhir. Uji publik keterbukaan badan publik digelar oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah, mulai Selasa, 21 November 2018 di gedung Pasca Sarjana Universitas Semarang.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar mendapat jadwal presentasi dalam uji publik pada hari Rabu, 22 November 2018, satu panel dengan Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Pekalongan.

Hadir langsung pada kesempatan tersebut Bupati Karanganyar Drs.H. Juliyatmono, MM didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Drs. Bachtiyar Syarif, Bupati Karanganyar dihadapan lima panelis diantaranya dari Komisi Informasi, Kemendagri, dan perwakilan Wartawan, mengusung tema Karanganyar Menuju SmartCity: Keterbukaan Informasi Berbasis Teknologi Informasi. Bahwasannya inti dari keterbukaan informasi publik adalah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah kepada masyarakat yang telah memilih atau memberikan amanat kepada Bupati untuk memimpin Karanganyar.

Dukungan terhadap keterbukaan informasi publik melalui teknologi informasi baik berupa website, media sosial atau aplikasi-aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam memberikan pelayanan, diharapkan tetap mempertimbangkan sisi lokalitas, kearifan lokal, dan tidak mematikan entitas lokal yang telah mapan sebelumnya. Sebagai contoh, saat ini Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan

DISKOMINFO
DISKOMINFO

Beberapa contoh halaman antarmuka website OPD

Layanan Kami

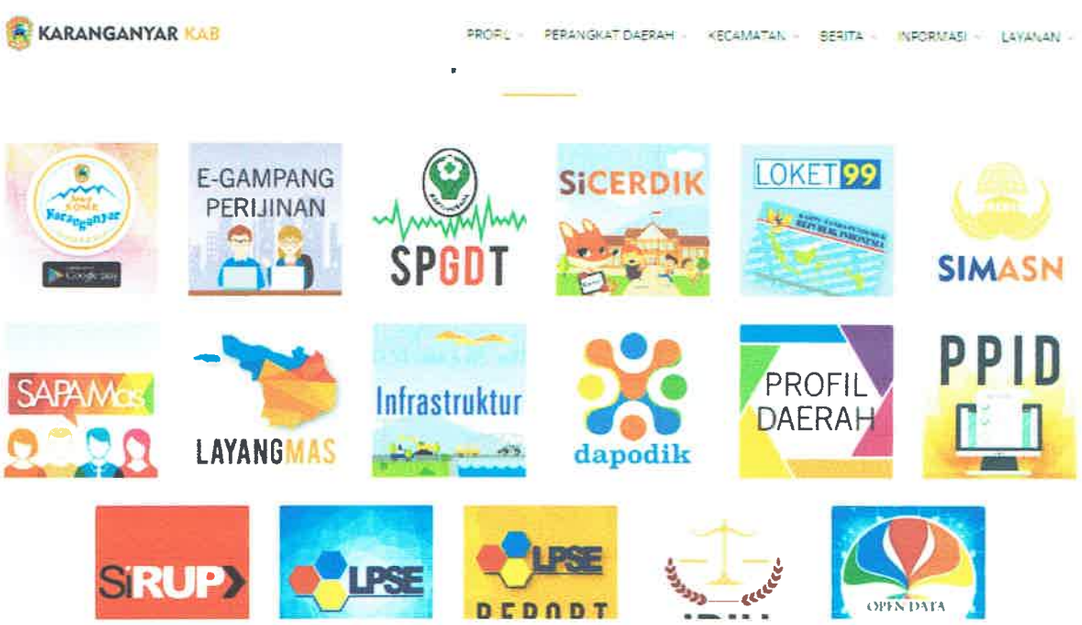

PENDAMPINGAN DAN MONITORING PPID PEMBANTU

JADWAL PENDAMPINGAN DAN MONITORING PPID PEMBANTU
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018

NO	HARI/TANGGAL	JAM	LOKASI OPD
1	Senin, 2 April 2018	09.00 - 11.00	1. DPUPR
		13.00 – 15.00	2. Baperlitbang
2	Rabu, 4 April 2018	09.00 – 11.00	3. Inspektorat
		13.00 – 15.00	4. Badan Keuangan Daerah
3	Selasa, 10 April 2018	09.00 – 11.00	5. Satpol PP
		13.00 – 15.00	6. BKPSDM
4	Kamis, 12 April 2018	09.00 – 11.00	7. Dinas LH
		13.00 – 15.00	8. DISPARPORA
5	Senin, 16 April 2018	09.00 – 11.00	9. DISDIKBUD
		13.0 - 15.00	10. DISHUB PKP

a.n. BUPATI KARANGANYAR
SEKRETARIS DAERAH

Drs. SAMSI, M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19581207 198503 1 010

JADWAL PENDAMPINGAN DAN MONITORING PPID PEMBANTU
TAHUN 2018 KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2018

NO	HARI/TANGGAL	JAM	LOKASI OPD
1	Rabu, 18 April 2018	09.00 - 11.00	1. KPTSP
		13.00 - 15.00	2. DISPERINDAGES
2	Selasa, 24 April 2018	09.00 - 11.00	3. DINSOS
		13.00 - 15.00	4. DPPAPPKB
3	Kamis, 26 April 2018	09.00 - 11.00	5. Dinas Kependudukan
		13.00 - 15.00	6. Disperindagkop
4	Senin, 30 April 2018	09.00 - 11.00	7. DISARPUN
		13.00 - 15.00	8. DISNAKAN
5	Rabu, 2 Mei 2018	09.00 - 11.00	9. SETWAN
		13.00 - 15.00	10. DPMPTSP
6	Selasa, 8 Mei 2018	09.00 - 11.00	11. DISPORTAN
		13.00 - 15.00	12. KPU
7	Rabu, 9 Mei 2018	09.00 - 11.00	13. DISNAKERTRANS & UKM
		13.00 - 15.00	14. Kec. Karanganyar

a.n. BUPATI KARANGANYAR
SEKRETARIS DAERAH

Drs. SAMSI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19581207 198503 1 010

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID)
Kabupaten Karanganyar

Bimbingan Teknis Bagi PPID Pembantu

Bimtek ini dihadiri kurang lebih 92 peserta yang terdiri dari PPID Pembantu dan Admin PDF masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 17 Kecamatan se Kabupaten Karanganyar yang diselenggarakan Hotel Taman Sari Karanganyar, Selasa(13/03/2018).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (13-14 Maret 2018) dihadiri sekaligus membuka bimtek, Pjs Bupati Karanganyar yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Karanganyar, Larmanto, menyampaikan peranan Pejabat Pengelolaan dan Dokumentasi (PPID) sangat penting dalam menginformasikan kebijakan program dan kegiatan serta hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat.

"Masyarakat semakin canggih, paham, dan pintar menyikapi pelaksanaan pembangunan dan secara keseluruhan menghendaki data pemerintah untuk dipublikasikan", ujarnya

Lebih lanjut ia mengatakan PPID dituntut lebih arif, bijaksana, berpikiran komprehensif dalam pengelolaan penyampaian informasi.

Selanjutnya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah selaku narasumber, F. X Handoko, menjelaskan tugas PPID utama dalam Pasal 12 antara lain menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi, menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi, menggordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu. Memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada public, melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik, melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi, menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, menugaskan PPID pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, memelihara informasi dan dokumentasi, membentuk tim fasilitasi penanganansengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Sedangkan Kewenangan PPID utama dalam pasal 13 antara lain menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meminta informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya, mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu, menentukan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh public, menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Uji Konsekuensi Atas Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Dilaksanakan di hari kedua bimtek 14/03/2018.